



**ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DALAM
KONTRIBUSINYA BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019-2021**

Allifia Azzahra^{1*}, Diah Armeliza², Ayatulloh Michael Musyaffi³

¹²³Universitas Negeri Jakarta

Abstract

In the Bandung Regency Government from 2019 to 2021, this study will use descriptive quantitative methods to examine regional financial independence, conditions of public welfare (in health, independence, employment, and education), and the contribution of financial independence to public welfare. This research found that the Bandung Regency Government's regional financial independence was classified as "Less" during the periods, with values of 17.89%, 19.07%, and 19.05%. For the benefit of its citizens, Bandung Regency has one or more health facilities in every sub-district; the poverty rate has climbed at a slower rate than the average of West Javan districts and cities; the rate of labor force participation in 2021 was higher than the average of West Javan districts and cities; and the rate of pure participation rose. In order to carry out welfare-enhancing programs, the Bandung Regency Government distributes funds to the appropriate authorities. The Bandung Regency Government, however, continues to seem as "Less" when examined through the impartiality of regional budgets. Consequently, transfer earnings are still crucial to the improvement of the Bandung Regency's residents' standard of living.

Keywords: *Regional Financial Independence, Regional Financial Independence Ratio, Community Welfare, Local Government Contribution.*

How to Cite:

Azzahra, A., Armeliza, D., & Musyaffi A, M., (2024) *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Kontribusinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bandung Tahun 2019-2021*, Vol. 5, No.2, hal 270-287.

*Corresponding Author: azzahraallifia5@gmail.com

PENDAHULUAN

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, desentralisasi dan otonomi daerah berlangsung di Indonesia. Tujuan penerapan otonomi daerah adalah untuk memberdayakan daerah agar dapat mengatur pengelolaan keuangannya sendiri, menyesuaikannya untuk memenuhi kebutuhan spesifik daerah, dan memungkinkan belanja yang lebih efisien dan terfokus. Bersamaan dengan desentralisasi adalah adanya otonomi daerah. Desentralisasi didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai peralihan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah mandiri yang dibentuk berdasarkan gagasan otonomi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menetapkan desentralisasi fiskal sebagai salah satu metode desentralisasi keuangan publik. Ketika pemerintah pusat mengalihkan sebagian tanggung jawab politik dan administratifnya kepada pemerintah daerah, praktik ini dikenal sebagai desentralisasi fiskal. Agar otonomi daerah dapat berjalan efektif, desentralisasi fiskal diperlukan. Tujuan desentralisasi fiskal adalah untuk memberdayakan daerah agar dapat mengambil keputusan sendiri, khususnya dalam hal pendanaan pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah (Joko Tri Haryanto, 2019).

Konsep kemandirian keuangan daerah didefinisikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2020 sebagai tidak adanya ketergantungan terhadap sumber pembiayaan di luar kendali atau pengaruh pemerintah daerah, baik sumber tersebut berasal dari lokal maupun internasional. Mencapai kemandirian keuangan di tingkat daerah telah menjadi tujuan pemerintahan. Namun kemandirian daerah terpuruk seiring dengan berlanjutnya era otonomi daerah.

Sebanyak 443 dari 503 pemerintah, atau 88,07%, masuk dalam kategori “Belum Mandiri”, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mengkaji independensi fiskal pemerintah daerah tahun 2020. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mensukseskan otonomi daerah masih perlu dibenahi agar usaha yang diberikan dapat meningkatkan kemandirian daerah lebih baik dan tujuan otonomi daerah tercapai. Seperti yang disampaikan Bapak Rizal Suhaili selaku Direktur Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektor Pembinaan Daerah pada Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Daerah BPKP dalam artikel yang diunggah pada *website* resmi BPK, yaitu “Kemandirian keuangan daerah menjadi faktor keberhasilan pembangunan ekonomi daerah serta terwujudnya daerah yang maju dan sejahtera”.

TINJAUAN TEORI

Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Otonomi daerah diartikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai kemampuan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan kepentingan penduduk setempat. Salah satu hasil dari pembentukan perekonomian regional adalah pengalihan kekuasaan dari tingkat federal ke tingkat negara bagian dan lokal, dengan tanggung jawab dibagi berdasarkan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan bantuan. Setiap daerah diharapkan memiliki kreativitas, inovasi, dan kemandirian sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Ini semua merupakan bagian dari upaya pemberdayaan daerah untuk mengelola pembangunan di daerahnya sendiri (Mega Christia & Ispriyarso, 2019).

Desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan kekuasaan dari pemerintah federal kepada pemerintah tingkat negara bagian dan lokal berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Fungsi-fungsi yang melibatkan distribusi, penyerahan, atau pembagian kekuasaan merupakan bagian integral dari setiap inisiatif desentralisasi. Desentralisasi fiskal mencakup sejumlah model yang berbeda. Untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dapat mengatasi masalah

ekonomi dan memaksimalkan potensi ekonomi mereka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah federal menerapkan program desentralisasi fiskal.

Pemerintah Daerah

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 menyatakan bahwa pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat di daerah bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan maksud UUD 1945 untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan asas otonomi sebesar-besarnya dalam lingkup daerah. Sistem itu bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, negara dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, sebagai tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk memberikan informasi relevan tentang situasi keuangan entitas pelapor dan seluruh transaksi yang terjadi dalam periode tertentu. Operasional pemerintah bergantung pada laporan keuangan untuk membantu memperkirakan nilai sumber daya ekonomi, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaporan, memantau keadaan keuangan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Perlu adanya pelaporan upaya dan hasil yang sistematis dan terorganisir dalam suatu periode pelaporan oleh masing-masing organisasi pelapor, dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Laporan realisasi anggaran, arus kas, perubahan ekuitas, perubahan saldo kelebihan anggaran, komentar atas laporan keuangan, dan lampirannya (laporan keuangan BUMD) merupakan semua bentuk laporan keuangan dasar yang wajib disusun oleh pemerintah daerah.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan diartikan sebagai tidak adanya ketergantungan terhadap sumber pendanaan eksternal, baik dalam maupun luar negeri, berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2020 tentang pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah dalam penyusunan formulasi indikator kondisi keuangan.

$$\text{Kemandirian Keuangan Dearah} = \frac{\text{Total PAD}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Adapun skala untuk melihat kemampuan keuangan daerah dapat menggunakan tabel dibawah ini.

Tabel 1. Skala Interval RKKD

Presentase	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Cukup
30,01-40,00	Sedang
40,00-50,00	Baik
>50,01	Sangat Baik

Sumber : (Pasaribu et al., 2021)

Indeks Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat Kesehatan Masyarakat

Indikasi penting terhadap kualitas pembangunan manusia suatu daerah adalah derajat kesehatan masyarakat dan gizi yang baik. Dinamika dan proses pertumbuhan ekonomi suatu bangsa atau daerah lebih baik didukung oleh masyarakat yang mempunyai kondisi kesehatan yang lebih baik. Pemerintah membutuhkan fasilitas kesehatan yang memadai untuk melakukan hal ini. Tingkat kualitas kesehatan yang lebih baik di suatu wilayah ditunjukkan dengan memiliki layanan kesehatan yang lebih banyak dan lebih baik. Penyediaan fasilitas kesehatan paling sedikit satu di setiap kecamatan wajib bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang fasilitas pelayanan kesehatan. Maka tingkat kesehatan masyarakat dapat dinyatakan melalui.

$$\text{Kesehatan} = \text{Jumlah fasilitas-fasilitas kesehatan}$$

Keterangan:

Kesehatan = Tingkat Kesehatan (unit)
 Jumlah fasilitas-fasilitas kesehatan = Jumlah RS, Jumlah puskesmas, Jumlah Puskesmas Pembantu dan Jumlah Apotek (unit)

Tingkat Kemiskinan Masyarakat

Ketika pendapatan seseorang terlalu rendah untuk memenuhi kebutuhan pangannya yang paling mendasar, hal ini disebut kemiskinan. Angka kemiskinan yang tinggi dikaitkan dengan besarnya proporsi penduduk miskin, menurut Badan Pusat Statistik. Seseorang dikatakan miskin jika pengeluaran bulannya berada di bawah garis kemiskinan. Badan Pusat Statistik telah memberikan rumus berikut untuk menghitung proporsi penduduk yang hidup dalam kemiskinan.

$$\text{Presentase Penduduk Miskin} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin} \times 100}{\text{Jumlah Seluruh Penduduk}}$$

Keterangan:

Presentase penduduk miskin = Presentase penduduk miskin (% jiwa)
 Jumlah penduduk miskin = Jumlah penduduk miskin (jiwa)
 Jumlah seluruh penduduk miskin = Jumlah seluruh penduduk pada suatu wilayah pada periode tertentu (jiwa)

Tingkat Ketenagakerjaan Masyarakat

Tingkat ketenagakerjaan di suatu wilayah merupakan gambaran mengenai jumlah penduduk yang bekerja dan yang menganggur. Indikator ketenagakerjaan antara lain seperti yang disampaikan Pramono (2021):

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa TPAK adalah partisipasi angkatan kerja bagi penduduk berumur 15 tahun ke atas. TPAK adalah suatu metode untuk menggambarkan proporsi penduduk suatu kelompok umur tertentu yang merupakan usia kerja (15 tahun ke atas). Tingginya TPAK menunjukkan banyaknya tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi produk dan jasa dalam suatu perekonomian (Humara, 2022). Berikut rumus perhitungan TPAK berdasarkan BPS.

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Angkatan Kerja}}{\text{Bekerja usia 15 Tahun ke atas}} \times 100$$

Keterangan:

- TPAK = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
 Angkatan kerja = Jumlah penduduk usia kerja 15 tahun keatas (jiwa)
 Bekerja usia 15 tahun keatas = Jumlah penduduk bekerja dengan usia 15 tahun keatas (jiwa)

b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT diartikan sebagai presentase jumlah pengangguran dari jumlah angkatan kerja, dilansir dari Badan Pusat Statistik. Tingginya TPT menunjukkan masih banyaknya calon pekerja yang tidak terserap oleh pemberi kerja, Humaira (2022). Berikut rumus perhitungan TPT menggunakan BPS:

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Keterangan:

- TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka (%jiwa)
 Jumlah pengangguran = Jumlah penduduk yang menganggur (jiwa)
 Jumlah angkatan kerja = Jumlah penduduk usia kerja dengan usia 15 tahun keatas yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran (jiwa)

Tingkat Pendidikan Masyarakat

Selain berinvestasi pada sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, memastikan bahwa setiap orang mempunyai akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas tinggi adalah soal keadilan dan kesetaraan dalam hal hasil pembangunan. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat masyarakat mendukung kesejahteraan masyarakat secara umum. Salah satu cara untuk mengukur mutu pendidikan adalah dengan melihat Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), sebagaimana tercantum dalam situs resmi APK-APM Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK memberikan perbandingan persentase antara jumlah siswa usia sekolah dengan penduduk usia sekolah. Salah satu kegunaan APK adalah untuk menentukan berapa banyak anak yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Semakin banyak anak usia sekolah yang mengikuti jenjang pendidikan tertentu atau semakin banyak anak yang diluar usia bersekolah ditunjukkan dengan APK yang lebih besar dari 100%. Berikut rumus APK.

$$APK = \frac{\text{Siswa Sekolah}}{\text{Penduduk Usia Sekolah}} \times 100$$

Keterangan:

- APK = Angka Partisipasi Kasar (%jiwa)
 Siswa sekolah = Jumlah siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (tanpa melihat usia standar siswa)
 Penduduk usia sekolah = Kelompok siswa usia standar di setiap jenjang pendidikan.

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM adalah sebagai persentase yang membandingkan jumlah siswa pada usia sekolah dan tingkat pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk pada usia tersebut. Banyaknya anak usia sekolah yang benar-benar terdaftar dalam jenjang yang tepat adalah tujuan utama penggunaan APM. Dengan nilai ideal 100%, APM yang tinggi menunjukkan bahwa banyak anak usia sekolah yang benar-benar terdaftar dan menyelesaikan pendidikan formal pada jenjang tertentu. Berikut rumus APM.

$$APM = \frac{\text{Siswa Usia Sekolah}}{\text{Penduduk Usia Sekolah}} \times 100$$

Keterangan:

APM	= Angka Partisipasi Murni (%jiwa)
Siswa usia sekolah	= Jumlah siswa yang bersekolah pada suatu jenjang dengan melihat usia standar pada jenjang masing-masing (jiwa)
Penduduk usia sekolah	= Kelompok siswa usia standar di setiap jenjang pendidikan (jiwa)

METODE

Pendekatan kuantitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Menurut Sudirman dan Sriwahyuningrum (2023), penelitian dapat membantu dalam interpretasi dan pengambilan keputusan dengan memberikan gambaran lengkap tentang data yang diperoleh melalui penggunaan teknik kuantitatif. Tujuan penggunaan metode deskriptif dapat membantu peneliti lebih memahami dan menjelaskan fenomena tersebut serta menarik kesimpulan yang lebih kuat dari analisisnya (Mulyani, 2021).

Unit analisis yang digunakan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dengan menggunakan data sekunder untuk penelitian ini. Informasi yang diperlukan diambil dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019–2021 yang tertampung pada *website* Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bandung, serta data Indikator Kesejahteraan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bandung yang diperoleh melalui *website* Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019-2021

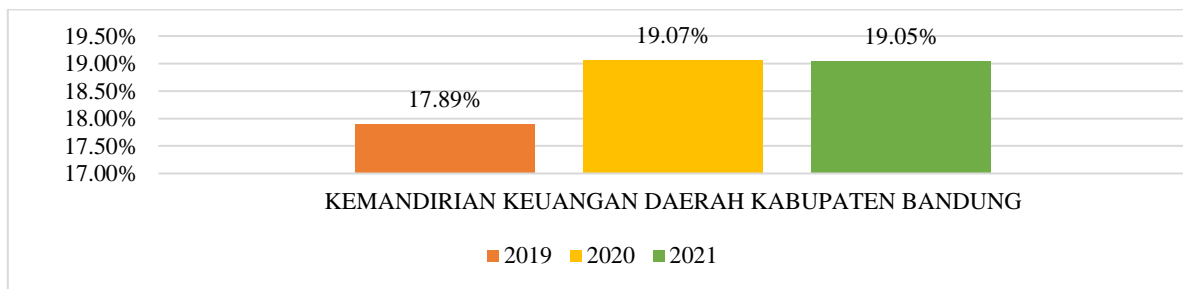
Rasio kemandirian keuangan daerah sesuai PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2019–2021 digunakan untuk mengetahui kemandirian keuangan Kabupaten Bandung tahun 2019–2021. Berikut hasil pengukuran tersebut.

Tabel 2. Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (1)	Total Pendapatan (2)	Kemandirian Keuangan Daerah (1:2)	Presentase (%)	Skala
2019	1,025,354,252,357.57	5,730,185,099,102.57	0.18	17.89%	Kurang
2020	1,019,355,741,053.99	5,345,992,773,326.99	0.19	19.07%	Kurang
2021	1,095,969,843,558.02	5,752,869,024,783.02	0.19	19.05%	Kurang

Sumber: LKPD Kabupaten Bandung Tahun 2019-2021 (Diolah Peneliti, 2024)

Gambar 1. Fluktuasi Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bandung



Sumber: LKPD Kabupaten Bandung Tahun 2019-2021 (Diolah Peneliti, 2024)

Pada tahun 2019 hingga tahun 2021, kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bandung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 menunjukkan angka sebesar 17,89%; pada tahun 2020 naik menjadi 19,07%; dan pada tahun 2021 turun menjadi 19,05%. Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bandung dinilai “Kurang” untuk tahun 2019–2021, berdasarkan skala yang diperoleh dari metrik tersebut. Pada skala yang ada pada Kabupaten Bandung sekurang-kurangnya harus menjadikan presentase kemandirian keuangan daerah menjadi “Cukup”. Akan tetapi nilai yang dihasilkan belum mencukupi dalam mencapai hal tersebut.

Akibat dari kondisi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berfluktuasi, maka tingkat kemandirian keuangan di Kabupaten Bandung pun mengalami fluktuasi. Penerimaan pajak daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah, dan PAD lainnya yang sah pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018. Dibandingkan tahun sebelumnya atau tahun 2018, penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan sebesar 12,08% atau sebesar Rp56.590.472.748,72; pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah yang sah naik 3,91% atau Rp2.637.178.467; dan pendapatan PAD lainnya yang sah naik 10,81% atau Rp39.452.012.082,59.

Pandemi Covid-19 pada Maret 2020, Jika dilihat berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik banyaknya pemerintah daerah atau kota pada Jawa Barat yang mengalami dampak dari adanya pandemi tersebut. Dampak paling utama untuk kemandirian keuangan daerah yaitu dengan menurunnya realisasi atau penerimaan PAD pada setiap pemerintah daerah kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat. Akan tetapi Kabupaten Bandung merupakan salah satu dari beberapa kabupaten atau kota tersebut yang memiliki kenaikan pada penerimaan PAD untuk tahun 2020. Penerimaan PAD Kabupaten Bandung untuk tahun 2020 naik sebesar 14,03% dari yang dianggarkan. Dalam hal ini upaya-upaya pemerintah Kabupaten Bandung berhasil menyelamatkan besar PAD yang diterima pada tahun 2020. Walaupun nominal PAD yang diterima pemerintah Kabupaten Bandung lebih kecil dari tahun sebelumnya akan tetapi nilai pendapatan transfer juga menurun dari tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi dikarenakan fokus pemerintah pusat yang beralih pada penanganan pandemi covid-19. Sehingga upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bandung dalam menyelamatkan PAD juga terlihat dengan tingkat kemandirian keuangan daerah yang meningkat untuk tahun 2020 menjadi 19,07%.

Seiring berjalannya waktu, satu tahun setelah pandemi Covid-19 hadir di Indonesia pemerintah daerah Kabupaten Bandung memiliki kemunduran 0,02% yang mengubah angka kemandirian keuangan daerah tahun 2020 sebesar 19,07% menjadi 19,05% untuk tahun 2021. Jika ditinjau kembali kenaikan yang ada pada PAD Kabupaten Bandung tetap terjadi pada tahun 2021 sebesar 8,51% dari yang dianggarkan. Tetapi jika dilihat pada nominal kenaikannya penerimaan PAD Kabupaten Bandung lebih besar naik pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2021. Selain itu terjadinya kenaikan nominal pada PAD Kabupaten Bandung tahun 2021 juga beriringan dengan kenaikan pendapatan transfer. PAD Kabupaten Bandung naik sebesar

7,52% atau sebesar Rp76.614.102.505,22 dari tahun 2020. Pendapatan transfer naik sebesar 8,58% atau Rp306.648.654.360 dari tahun 2020. Jika dilihat kenaikan penerimaan PAD dan pendapatan transfer Kabupaten Bandung untuk tahun 2021 tidak sebanding hal ini menyebabkan terjadinya penurunan angka kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten Bandung untuk tahun 2021 menjadi 19,05%.

Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bandung Tahun 2019-2021

Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung tahun 2019 sampai dengan 2021 terdiri dari empat bidang yaitu:

Tingkat Kesehatan

Pemerintah daerah wajib mendirikan pusat kesehatan masyarakat paling sedikit satu pada setiap kecamatan sesuai ketentuan Pasal 11 PP Nomor 47 Tahun 2016 tentang fasilitas kesehatan. Berikut jumlah fasilitas kesehatan yang ada pada Kabupaten Bandung.

Tabel 3. Fasilitas Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2019-2021

Tahun	Fasilitas Kesehatan			
	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotek
2019	11	67	110	137
2020	10	66	92	141
2021	10	63	71	142

Sumber: Kabupaten Bandung dalam angka Tahun 2022 (Diolah Peneliti, 2024)

Tabel berikut menunjukkan bahwa antara tahun 2020 dan 2021, jumlah rumah sakit di Kabupaten Bandung mengalami penurunan. Setelah mencapai 67 pada tahun 2019, jumlah puskesmas turun menjadi 66 pada tahun 2020 dan 63 pada tahun 2021. Pada tahun 2020, terdapat 110 puskesmas pembantu, tahun 2020 turun menjadi 92 dan tahun 2021 turun menjadi 71. Dampak pandemi COVID-19 menyebabkan ditutupnya beberapa institusi kesehatan di Kabupaten Bandung yang turut menyebabkan penurunan tersebut.

Namun hal ini berbeda dengan kondisi apotek di Kabupaten Bandung yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan akan adanya kebutuhan obat yang naik pada tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, sejumlah lini farmasi membuka prospek bisnis baru untuk memenuhi kebutuhan. Sesuai Pasal 11 Nomor 47 Tahun 2016, Kabupaten Bandung wajib menyediakan pusat kesehatan masyarakat di setiap kecamatan dalam wilayah kabupaten. Berikut data fasilitas kesehatan berupa puskesmas dalam menyediakan pelayanan kesehatan pada setiap kecamatan pada Kabupaten Bandung.

Tabel 4. Jumlah Puskesmas Per Kecamatan pada Kabupaten Bandung Tahun 2019-2021

No	Kecamatan	Puskesmas		
		2019	2020	2021
1	Ciwidey	2	2	2
2	Rancabali	1	1	1
3	Pasirjambu	3	2	2
4	Cimaung	2	2	2
5	Pangalengan	3	3	3
6	Kertasari	2	2	2
7	Pacet	2	2	2
8	Ibun	3	2	2
9	Paseh	2	2	2
10	Cikancung	3	3	2
11	Cicalengka	2	2	2
12	Nagreg	1	1	1

Puskesmas				
No	Kecamatan	2019	2020	2021
13	Rancaekek	3	3	3
14	Majalaya	3	3	3
15	Solokanjeruk	1	2	2
16	Ciparay	3	3	3
17	Baleendah	3	3	3
18	Arjasari	2	2	2
19	Banjaran	2	2	2
20	Cangkuang	2	1	1
21	Pameungpeuk	1	1	1
22	Katapang	4	4	3
23	Soreang	2	2	2
24	Kutawaringin	1	2	2
25	Margaasih	2	3	2
26	Margahayu	2	2	2
27	Dyeuhkolot	2	2	2
28	Bojongsoang	1	1	1
29	Cileunyi	4	3	3
30	Cilengkrang	1	1	1
31	Cimendan	2	2	2
Total		67	66	63

Sumber: Kabupaten Bandung dalam angka Tahun 2022 (Diolah Peneliti, 2024)

Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan tidak hanya berdampak pada kondisi keuangan masyarakat, namun juga mempunyai dampak sosial dan budaya yang luas. Salah satu pendekatan untuk menilai kemiskinan, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), adalah dengan melihat proporsi penduduk miskin. Presentase penduduk miskin merupakan ukuran tingkat kemiskinan secara keseluruhan di suatu wilayah tertentu. Jika tinggi berarti kemiskinan di wilayah tersebut juga tinggi. Berikut tingkat atau presentase penduduk miskin Kabupaten Bandung untuk tahun 2019-2021.

Tabel 5. Kondisi presentase penduduk miskin pada Kabupaten Bandung Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin (dalam ribu)	Presentase Penduduk Miskin (%)
2019	3.775.279	232,20	5,94
2020	3.623.790	263,60	6,91
2021	3.666.156	269,20	7,15

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung (Diolah Peneliti, 2024)

Proporsi penduduk yang hidup dalam kemiskinan meningkat dari tahun ke tahun, seperti terlihat pada tabel di atas. Presentase naik dari 5,94% pada tahun 2019 menjadi 6,91% pada tahun 2020 atau meningkat sebesar 0,97%. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar 0,24% sehingga totalnya menjadi 7,15%. Meningkatnya presentase tersebut merupakan dampak langsung dari semakin banyaknya penduduk berpenghasilan rendah yang tinggal di sana. Keadaan perekonomian Kabupaten Bandung terdampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan presentase penduduk miskin tersebut meningkat. Dalam hal ini, Kabupaten Bandung juga mengalami keterpurukan pada laju perekonomian. Berikut disajikan data Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung dari tahun 2019 hingga tahun 2021.

Tabel 6. Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Bandung Tahun 2019-2021

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi
2019	6,36
2020	-1.80
2021	3,56

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung (Diolah Peneliti, 2024)

Pada masa pandemi COVID-19 besarnya laju pertumbuhan ekonomi menyentuh angka -1,80%, hal ini sangat membawa pengaruh buruk pada segi kemiskinan. Dalam hal ini menurunnya laju pertumbuhan ekonomi karena diberlakukannya PSBB di Indonesia. Berlakunya PSBB ini menghambat kegiatan perekonomian termasuk jual beli dan pekerjaan. PSBB ini berdampak pada UMKM kecil yang tidak bisa bertahan sehingga terpaksa bangkrut. Banyaknya efisiensi karyawan yang menyebabkan kenaikan jumlah pegawai yang diberhentikan atau kenaikan tingkat pengangguran akibat pandemi COVID-19.

Rata-rata pertumbuhan penduduk miskin di kabupaten dan kota di Jawa Barat lebih besar dibandingkan peningkatan di Kabupaten Bandung pada tahun 2019 hingga 2021. Presentase penduduk miskin di setiap kabupaten dan kota di Jawa Barat pada tahun 2019 hingga 2021 disajikan di bawah ini.

Tabel 7. Kondisi Presentase Penduduk Miskin Per-Kabupaten/Kota
pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021

No	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Bogor	6.66	7.69	8.13
2	Sukabumi	6.22	7.09	7.70
3	Cianjur	9.15	10.36	11.18
4	Bandung	5.94	6.91	7.15
5	Garut	8.98	9.98	10.65
6	Tasikmalaya	9.12	10.34	11.15
7	Ciamis	6.65	7.62	7.97
8	Kuningan	11.41	12.82	13.10
9	Cirebon	9.94	11.24	12.30
10	Majalengka	10.06	11.43	12.33
11	Sumedang	9.05	10.26	10.71
12	Indramayu	11.11	12.70	13.04
13	Subang	8.12	9.31	10.03
14	Purwakarta	7.48	8.27	8.83
15	Karawang	7.39	8.26	8.95
16	Bekasi	4.01	4.82	5.21
17	Bandung Barat	9.38	10.49	11.30
18	Pangandaran	7.71	8.99	9.65
19	Kota Bogor	5.77	6.68	7.24
20	Kota Sukabumi	6.67	7.70	8.25
21	Kota Bandung	3.38	3.99	4.37
22	Kota Cirebon	8.41	9.52	10.03
23	Kota Bekasi	3.81	4.38	4.74
24	Kota Depok	2.07	2.45	2.58
25	Kota Cimahi	4.39	5.11	5.35
26	Kota Tasikmalaya	11.60	12.97	13.13
27	Kota Banjar	5.50	6.09	7.11
28	Provinsi Jawa Barat	6.91	7.88	8.40
	Rata-Rata	7.39	8.41	8.95
	Naik/Turunnya		1.02	0.54

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung (Diolah Peneliti, 2024)

Secara keseluruhan, angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat meningkat sebesar 1,02% pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 dan naik sebesar 0,54% pada tahun 2021. Penduduk miskin di Kabupaten Bandung memperoleh persentase kenaikan yang lebih rendah pada tahun 2020 dan 2021 dibandingkan rata-rata kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Angka kemiskinan di Kabupaten Bandung mengalami kenaikan sebesar 0,97% pada tahun 2020 dan 0,24% pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung telah melakukan langkah-langkah baik dalam menekan kenaikan angka kemiskinan.

Tingkat Ketenagakerjaan

Berikut kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung untuk Tahun 2019-2021:

a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bandung Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021

Tabel 8. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bandung Tahun 2019-2021

Tahun	Angkatan Kerja	Pengangguran	TPT (Persen %)
2019	1.786.162	97.956	5,51
2020	1.717.376	147.402	8,58
2021	1.824.927	151.908	8,32

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung (Diolah Peneliti, 2024)

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bandung pada tahun 2019 sebesar 5,51% seperti terlihat pada tabel di atas. Angka ini menunjukkan bahwa pengangguran yang ada pada Kabupaten Bandung masih lebih rendah daripada orang atau penduduk yang bekerja. Akan tetapi pada tahun 2020, TPT mengalami kenaikan presentase menjadi 8,58%. Kenaikan presentase tersebut disebabkan tersebut disebabkan oleh pandemi covid-19 yang hadir di Indonesia. Adanya kebijakan PSBB yang hadir karena dipicu dengan penyebaran covid-19 yang tinggi. Hal ini mengakibatkan banyak Perusahaan atau bahkan UMKM mengalami dampak buruk. Sehingga mendukung Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bandung menjadi meningkat pada tahun 2020. Berikut data pengangguran terdampak covid-19 dan juga penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena covid-19 dan juga sementara tidak bekerja karena covid-19 yang mendukung kenaikan TPT Kabupaten Bandung untuk tahun 2020.

Tabel 9. Data Penduduk Terdampak Pandemi Covid-19 Kabupaten Bandung Tahun 2020 dan 2021

Uraian	Agustus 2020	Agustus 2021
Pengangguran Karena Covid-19	59.231	29.624
Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19	34.469	23.730
Penduduk Bekerja yang mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena Covid-19	375.069	445.803

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung (Diolah Peneliti, 2024)

Pandemi COVID-19 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bandung pada tahun 2020 dan 2021 karena banyaknya penduduk yang terkena dampak. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Bandung telah melakukan sejumlah inisiatif untuk membantu menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung telah berupaya keras untuk meningkatkan perekonomian, dan pada tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 8,32%.

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bandung Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021

Tabel 10. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bandung Tahun 2019-2021

Tahun	Angkatan Kerja	Bekerja dengan usia 15 tahun keatas	TPAK (Persen %)
2019	1.786.162	1.116.721	65,32
2020	1.717.376	1.068.208	62,20
2021	1.824.927	1.188.392	65,12

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung (Diolah Peneliti, 2024)

Pada tahun 2019-2021 menunjukkan perubahan tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Bandung. Sebanyak 65,32% penduduk Kabupaten Bandung bekerja pada tahun 2019. Data tersebut menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk yang bekerja dibandingkan yang tidak bekerja. Sayangnya, TPAK tahun 2020 turun menjadi 62,20% karena pandemi COVID-19. Penurunan presentase TPAK pada Kabupaten Bandung untuk tahun 2020 sebesar 3,12% memang lebih besar dari penurunan rata-rata kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Barat dengan besar penurunan 0,61%.

Sisi baiknya, tahun 2021 masih akan menjadi tahun yang lebih baik dibandingkan tahun 2020 karena TPAK meningkat sebesar 2,92% menjadi 65,21%, Kenaikan ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata kenaikan kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sebesar 0,03%. Hal ini menjadi pertanda baik bagi perekonomian dan ketenagakerjaan yang dilakukan pemerintah. Berikut rata-rata TPAK seluruh kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 11. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Per-Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021

Uraian	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)		
	2019	2020	2021
Provinsi Jawa Barat	64.99	64.53	64.95
Bogor	65.41	62.65	62.55
Sukabumi	62.65	61.56	64.93
Cianjur	66.00	69.26	67.98
Bandung	65.32	62.20	65.12
Garut	62.60	61.11	62.76
Tasikmalaya	66.46	69.54	68.18
Ciamis	67.39	71.41	69.83
Kuningan	61.20	61.98	63.82
Cirebon	65.23	63.79	64.49
Majalengka	67.83	69.66	67.63
Sumedang	63.90	68.96	68.51
Indramayu	67.69	69.53	69.86
Subang	67.67	66.70	67.78
Purwakarta	63.88	60.91	61.13
Karawang	63.57	64.90	64.19
Bekasi	64.02	64.23	65.87
Bandung Barat	61.97	59.91	60.75
Pangandaran	75.08	76.79	74.75
Kota Bogor	63.68	60.81	61.77
Kota Sukabumi	62.48	55.74	56.86
Kota Bandung	65.90	64.71	65.31

Uraian	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)		
	2019	2020	2021
Kota Cirebon	62.71	63.76	62.87
Kota Bekasi	65.66	64.74	64.76
Kota Depok	64.96	63.96	62.62
Kota Cimahi	63.26	62.67	61.79
Kota Tasikmalaya	65.26	66.54	65.75
Kota Banjar	67.59	67.35	64.07
Rata-Rata	65.16	65.00	65.03
Naik/Turunnya		-0.16	0.03

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung (Diolah Peneliti, 2024)

Tingkat Pendidikan

Berikut data indikator APK dan APM dalam menggambarkan tingkat pendidikan.

a. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Bandung Tahun 2019-2021

Tabel 12. Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten Bandung Tahun 2019-2021

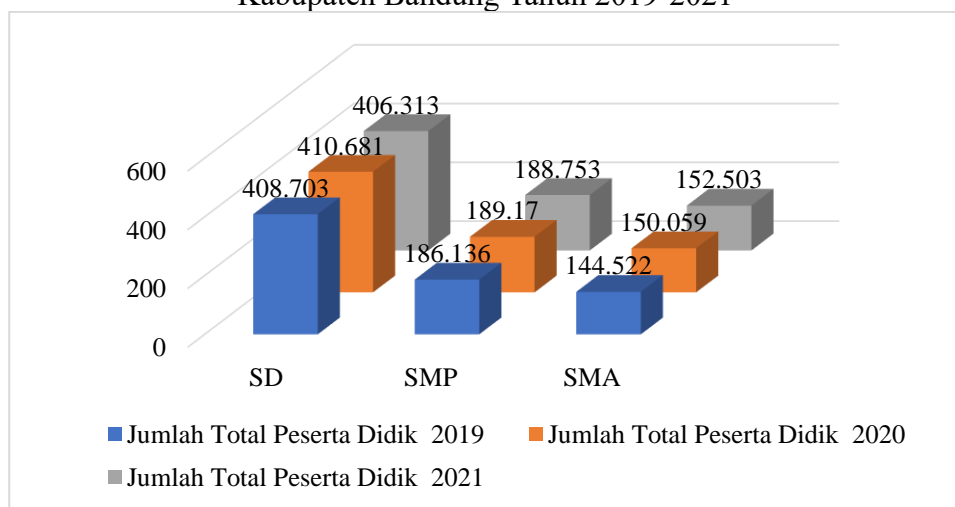
Jenjang	Angka Partisipasi Kasar (APK)		
	2019	2020	2021
SD	101,86	102,855	99,41
SMP	97,78	98,89	97,46
SMA	74,04	77,33	78,87

Sumber: APK-APM Data Kemendikbud (Diolah Peneliti, 2024)

Jika dilihat dari tabel diatas mengenai APK Kabupaten Bandung tahun 2019-2021, tingkat Sekolah Dasar menjadi Tingkat yang paling tinggi besaran APKnya. Yang menurut Sistem Informasi APK-APM pada website resmi APK-APM Kemendikbud, makin tinggi APK atau nilai APK hampir atau lebih 100% berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak di luar usia sekolah. Dengan itu menunjukkan bahwa SD memiliki banyak anak usia sekolah yang bersekolah di luar sekolah. Sedangkan APK terkecil jatuh pada jenjang atau Tingkat SMA dalam hal ini menggambarkan bahwa SMA memiliki banyak anak usia sekolah yang bersekolah di dalam usia sekolah.

Perkembangan APK untuk tahun 2019 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi pada Tingkat SD dan mengalami kenaikan untuk Tingkat SMP dan SMA. Hal ini terjadi beriringan dengan fluktuasi besarnya jumlah total peserta didik pada SD, SMP dan kenaikan jumlah total peserta didik pada jenjang SMA. Kenaikan siswa pada SD atau jumlah peserta didik SD untuk tahun 2020 sebesar 1.978 jiwa dan mengalami penurunan untuk tahun 2021 sebesar 4.638 jiwa. Kenaikan siswa pada SMP atau jumlah total peserta didik SMP untuk tahun 2020 sebesar 3.034 jiwa dan mengalami penurunan untuk tahun 2021 sebesar 417 siswa. Sedangkan total peserta didik untuk jenjang SMA mengalami kenaikan untuk tahun 2020 dan 2021, tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 5.537 jiwa dan tahun 2021 mengalami kenaikan 2.444 jiwa. Berikut data mengenai perkembangan jumlah total peserta didik Kabupaten Bandung untuk periode tahun 2019-2021.

Gambar 2. Fluktuasi Jumlah Total Peserta Didik Kabupaten Bandung Tahun 2019-2021



Sumber: APK-APM Data Kemendikbud (Diolah Peneliti, 2024)

a. **Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Bandung periode Tahun 2019-2021**

Tabel 13. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Bandung Tahun 2019-2021

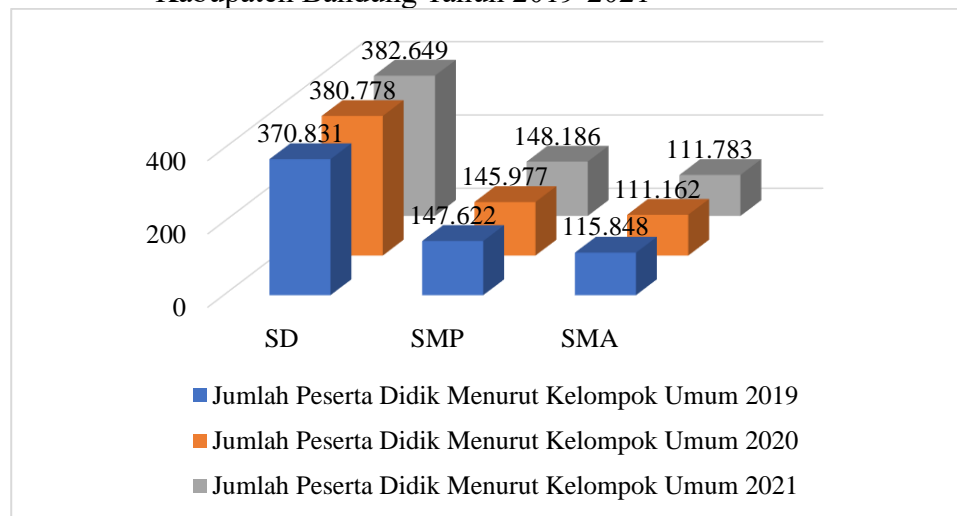
Jenjang	Angka Partisipasi Murni (APM)		
	2019	2020	2021
SD	92,42	95,36	93,62
SMP	77,55	76,31	76,51
SMA	59,35	57,28	57,81

Sumber: APK-APM Data Kemendikbud (Diolah Peneliti, 2024)

Jika dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa setiap jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP dan SMA tidak ada yang menunjukkan nilai APM sebesar 100%. Yang mana menurut Sistem Informasi APK-APM pada *website* resmi APK-APM Kemendikbud, makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah dengan usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Nilai idealnya 100%. Dalam hal ini tampak bahwa setiap jenjang yang ada masih banyak siswa yang bersekolah di luar usia sekolah.

Akan tetapi usaha yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Bandung dalam meningkatkan APM membuahkan hal baik. Pada setiap tahunnya mengalami peningkatan yang baik. Dengan menunjukkan Tingkat APM yang berangsur tumbuh hampir menyentuh 100%. Setiap jenjang pendidikan mengalami fluktuasi APM untuk periode 2019 sampai dengan 2020. Akan tetapi SD memiliki besar APM yang hampir menyentuh 100% dan menunjukkan hal positif bagi APM. Tahun 2019 APM SD sebesar 92,94% lalu naik menjadi 95,36% dan turun npada tahun 2022 menjadi 93,62%. kenaikan ini beriringan dengan fluktuasi jumlah peserta didik menurut kelompok usia sekolah. Berikut data perkembangan jumlah siswa dengan usia sekolah.

Gambar 3. Fluktuasi Jumlah Siswa dengan Usia Sekolah Kabupaten Bandung Tahun 2019-2021



Sumber: APK-APM Data Kemendikbud (Diolah Peneliti, 2024)

Kontribusi tingkat kemandirian keuangan daerah dalam kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung Tahun 2019-2021

Kontribusi kemandirian keuangan daerah pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung disalurkan melalui adanya belanja yang mendukung kegiatan kesejahteraan tersebut. Akan tetapi jika dilihat dari kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bandung yang menunjukkan "Kurang" untuk tahun 2019 sampai dengan 2021 menggambarkan bahwa besarnya kontribusi kemandirian dalam alokasi belanja untuk kesejahteraan masyarakat masih "Kurang" atau dalam hal ini pendapatan transfer yang lebih berperan dalam jumlah alokasi belanja untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung. Alokasi dari Belanja tersebut diberikan pada masing-masing dinas untuk kegiatan kesejahteraan. Belanja untuk Dinas Kesehatan, Belanja untuk Dinas Sosial, Belanja untuk Dinas Ketenagakerjaan dan Belanja untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Berikut adalah rincian dari alokasi belanja pada masing-masing dinas tersebut.

Tabel 4. 1 Alokasi Belanja untuk Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bandung Tahun 2019-2021

Dinas	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
Dinas Kesehatan	Anggaran	355,762,599,108.00	366,106,640,314.39	647,987,803,062.94
	Realisasi	304,766,475,814.00	271,848,531,924.00	459,797,069,173.00
Dinas Pendidikan	Anggaran	2,016,307,493,101.14	1,927,036,708,837.67	2,139,212,685,046.24
	Realisasi	1,941,973,578,345.00	1,849,710,139,900.00	1,944,355,029,229.00
Dinas Sosial	Anggaran	46,580,428,317.43	28,055,385,255.63	58,575,761,661.02
	Realisasi	41,786,413,090.00	25,318,024,377.00	51,620,923,129.00
Dinas Ketenagakerjaan	Anggaran	48,951,870,514.29	26,771,458,016.21	37,383,857,177.90
	Realisasi	46,834,818,551.00	24,189,258,499.00	35,406,437,319.00

Sumber: LKPD Kabupaten Bandung Tahun 2019-2021 (Diolah Peneliti, 2024)

Pada setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Bandung mengalokasikan atau menganggarkan setiap kegiatan kesejahteraan melalui dinas terkait. Hal ini dapat dilihat pada

tabel diatas. Setiap tahunnya dinas kesehatan diberikan anggaran yang meningkat untuk kegiatan yang memfasilitasi kesehatan masyarakat Kabupaten Bandung, seperti membuat puskesmas dan puskesmas pembantu, melakukan perawatan pada setiap fasilitas kesehatan, memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat dan lain sebagainya.

Dinas pendidikan dalam kegiatan belanja yang menunjang pendidikan masyarakat Kabupaten Bandung seperti adanya program perawatan fasilitas pendidikan, meningkatkan kompetensi para guru dan lain sebagainya. Begitu pula dengan dinas sosial dan ketenagakerjaan yang memiliki fungsi masing-masing dalam menjalankan setiap kegiatan-kegiatan yang menunjang dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung. Dinas Ketenagakerjaan memiliki program pelatihan untuk penyaluran kerja dan Dinas Sosial memiliki program untuk memberikan bantuan sosial untuk para penduduk miskin yang ada pada Kabupaten Bandung.

Dengan adanya pengalokasian tersebut berdampak baik pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung, seperti yang ditunjukkan dengan berhasilnya Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menekan kenaikan presentase penduduk miskin Kabupaten Bandung untuk periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Hal ini ditunjukkan dengan adanya presentase kenaikan penduduk miskin yang lebih kecil dari besar kenaikan pada rata-rata kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat. Tahun 2020, Pemerintah Kota dan Kabupaten di Jawa Barat memiliki rata-rata kenaikan presentase penduduk miskin sebesar 1,02% dan tahun 2021 sebesar 0,54%. Sedangkan Kabupaten Bandung hanya mengalami kenaikan sebesar 0,97% untuk tahun 2020 dan 0,24% untuk tahun 2021.

Tingkat kesejahteraan masyarakat melalui ketenagakerjaan mengalami peningkatan yang baik pada TPAK yang naik sebesar 2,92% pada tahun 2021 menjadi 65,21%. Kenaikan TPAK tahun 2021 Kabupaten Bandung lebih besar daripada kenaikan TPAK untuk seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Barat yang mana sebesar 0,03%. Kenaikan TPAK tahun 2021 menunjukkan bahwa upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian dan juga meningkatkan jumlah orang bekerja berbuah baik. Pada tingkat kesejahteraan masyarakat melalui fasilitas kesehatan yang mampu menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan yang baik dan memadai walaupun terhalau Pandemi Covid-19. Fasilitas kesehatan berupa rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu.

Bidang pendidikan merupakan salah satu bagian dari kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung. Dalam hal ini pendidikan Kabupaten Bandung memiliki kondisi yang baik pada Angka Partisipasi Murni (APM). Dengan menunjukkan tingkat APM yang berangsur tumbuh hampir menyentuh 100%. Tahun 2019 APM SD sebesar 92,42% lalu naik menjadi 95,36% untuk tahun 2020. Meskipun APM untuk jenjang SMP dan SMA mengalami penurunan pada tahun 2020 dikarenakan Pandemi Covid-19, akan tetapi untuk tahun 2021 APM jenjang SMP dan SMA menunjukkan perubahan positif atau naik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian keuangan Kabupaten Bandung dari tahun 2019 ke tahun 2021 mengalami fluktuasi, hal ini terlihat dari perhitungan yang dilakukan. Pada tahun 2019 menunjukkan sebesar 17,89%, pada tahun 2020 naik menjadi 19,07% dan pada tahun 2021 turun menjadi 19,05%. Skala yang didapat atas pengukuran tersebut menunjukkan bahwa kondisi kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bandung untuk periode 2019-2021 dikatakan "Kurang". Upaya pengelolaan PAD masih dinilai kurang melihat tingkat kemandirian, karena besarnya PAD masih lebih kecil daripada pendapatan transfer.

2. Atas penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung dalam segi kesehatan, Pemerintah Kabupaten Bandung memiliki fasilitas kesehatan lebih dari pada setiap kecamatan yang ada. Pada segi kemiskinan, presentase penduduk miskin berhasil ditekan agar tidak menyebabkan presentase naik tinggi untuk tahun 2021. Pada segi ketenagakerjaan, TPAK yang naik sebesar 2,92% untuk tahun 2021 dan kenaikan tersebut lebih besar dari rata-rata kenaikan TPAK Kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat. APM berhasil meningkat tahun 2021 pada jenjang SMP dan SMA, dan APM yang hampir menyentuh 100% untuk jenjang SD menggambarkan banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu.
3. Atas penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung mengalokasikan anggaran belanja untuk kegiatan kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari kesehatan, kemiskinan, ketenagakerjaan dan pendidikan pada setiap dinas-dinas yang terkait. Dengan adanya pengalokasian tersebut dapat membawa kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung menjadi lebih baik seperti yang ditunjukkan pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung tahun 2019-2021. Akan tetapi jika dilihat dari besarnya kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bandung untuk tahun 2019-2021 menunjukkan "Kurang", maka hal ini menggambarkan perubahan positif yang ada pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung masih bergantung pada pendapatan transfer.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Bandung dapat memanfaatkan potensi yang ada di wilayah Kabupaten Bandung untuk meningkatkan PAD. Kabupaten Bandung memiliki banyak potensi yang belum tergali, seperti bentang alamnya yang menakjubkan, yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan industri wisata alam dan mendongkrak nilai PAD yang ada. Tambahan PAD juga dapat dihasilkan melalui potensi lain, seperti peningkatan UMKM yang ada. Makin tinggi kontribusi PAD maka tingkat kemandirian keuangan daerah dan kontribusi pada alokasi belanja kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung akan lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019, Laporan Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 dan 2019*.
- Badan Pusat Statistik*.
- Humaira, M., Batubara, M., & Yusuf, M. (2022). Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Pengangguran di Kota Binjai Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02). <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>
- Indonesia, P. P. (1999, May 7). *Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Indonesia-Pemerintah Pusat. (2014, October 2). *Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Indonesia-Pemerintah Pusat. (2016, October 31). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan*. Jakarta.
- Indonesia-Pemerintah Pusat. (2020, March 20). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengeolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Joko Tri Haryanto. (2019). *Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim: Suatu Pengantar: Analisis Kapasitas Fiskal dan Belanja Fungsi Lingkungan Hidup Studi Kasus: Provinsi di Indonesia*.
- Kementrian Pendidikan dan Budaya. (2017). *Sistem Informasi APK-APM*. Jakarta.
- Mega Christia, A., & Ispriyarso, B. (2019). *Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia Law Reform Volume 15, Nomor 1, Tahun 2019*. 149–163. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Mulyani, S. R. (2021). *Metodologi Penelitian*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Pasaribu, E., Septriani, Benardin, & Febriani, R. E. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu: Pendekatan Derajat Desentralisasi Fiskal. *Akuntabilitas Vol.15, No.1, Januari 2021*, 15(1), 137–154.
- Pemerintah Kabupaten Bandung. (n.d.). *Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2019-2021*.
- Pramono, D. Widodo. R. (2021). *Modul Teknik Analisis dan Perencanaan Wilayah*. Deepublish.
- Sudirman, K. M. L., & Sriwahyuningrum, A. (2023). *Metodologi Penelitian 1*. CV Media Sains Indonesia.